

**PENGEMBANGAN FUNGSI KELEMBAGAAN DESA
(STUDI PADA DESA CIKERUH KABUPATEN SUMEDANG)**

Irfan Setiawan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

E-mail: irfansetiawan@ipdn.ac.id

ABSTRAK. Kelembagaan desa bukan hanya sebagai entitas administratif, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai fungsi kelembagaan desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Desa Cikeruh, kendala dalam pengembangan fungsi kelembagaan desa di Desa Cikeruh, dan konsep pengembangan fungsi kelembagaan desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien. Penelitian menggunakan metode kualitatif untuk mempertegas pada masalah tentang apa adanya sesuai pada fenomena di lapangan yang bersumber dari data, ucapan atau tulisan dari individu atau perilaku yang diobservasi dengan informan dari perangkat desa, kelembagaan desa dan Masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas kelembagaan Desa Cikeruh memerlukan penguatan administrasi desa, peningkatan partisipasi masyarakat, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Melalui partisipasi aktif dalam Musrenbang dan berbagai program pemberdayaan, masyarakat tidak hanya mendapatkan infrastruktur yang lebih baik tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan membangun kebersamaan yang kokoh. Untuk mengoptimalkan pengembangan kapasitas kelembagaan Desa Cikeruh, disarankan agar pemerintah desa meningkatkan investasi dalam pelatihan aparatur desa, memanfaatkan teknologi informasi untuk administrasi yang lebih efisien, serta memperkuat koordinasi dan komunikasi antar lembaga. Partisipasi masyarakat harus terus didorong melalui program pemberdayaan dan Musrenbang, dengan tujuan membangun kebersamaan dan meningkatkan kualitas hidup.

Kata kunci: Kelembagaan, Fungsi Kelembagaan, Desa, Pemerintahan Desa

**THE DEVELOPMENT OF VILLAGE INSTITUTIONAL FUNCTIONS
(A STUDY IN CIKERUH VILLAGE, SUMEDANG REGENCY)**

ABSTRACT. Village institutions are not only administrative entities, but also agents of change capable of bridging community interests and government policies. Based on this, this study aims to examine the function of village institutions in supporting governance in Cikeruh Village, obstacles in developing village institutional functions in Cikeruh Village, and the concept of developing village institutional functions to support effective and efficient village governance. The study uses qualitative methods to emphasize the problem of what it is according to the phenomena in the field sourced from data, statements or writings from individuals or behavior observed with informants from village officials, village institutions and the community. The results of the study indicate that developing the institutional capacity of Cikeruh Village requires strengthening village administration, increasing community participation, and optimizing resource management to achieve effective and efficient governance. Through active participation in Musrenbang and various empowerment programs, the community not only obtains better infrastructure but also strengthens economic capacity, improves quality of life, and builds a strong togetherness. To optimize the development of institutional capacity in Cikeruh Village, it is recommended that the village government increase investment in village apparatus training, utilize information technology for more efficient administration, and strengthen coordination and communication between institutions. Community participation must continue to be encouraged through empowerment programs and Musrenbang, with the aim of building togetherness and improving the quality of life.

Keywords: Institution, Institution Function, Village, Village Governmental

PENDAHULUAN

Desa sering kali mengandalkan sumber daya alam sebagai elemen utama dalam kehidupan sehari-hari, mencerminkan ketergantungan yang besar terhadap lingkungan sekitar. Tata kelola desa melibatkan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa (Michael, 2020). Namun, desa menghadapi tantangan, khususnya

terkait masalah pertanahan, termasuk definisi dan klasifikasi tanah desa yang tidak jelas (Diniyanto, 2019). Undang-Undang Desa No. 6/2014 memberikan desa otonomi yang lebih luas dalam perencanaan pembangunan berdasarkan prioritas masyarakat (Sialagan et al., 2020). Masyarakat desa saling mengenal dengan baik, menciptakan ikatan sosial yang erat, dan memiliki corak kehidupan yang relatif homogen. Desa melibatkan aspek-aspek seperti interaksi sosial yang erat, ketergantungan pada lingkungan alam, keberadaan batas wilayah yang jelas, ikatan keluarga yang kuat, serta kemampuan untuk mengatur dan mengurus kehidupan bersama.

Penyelenggaraan pemerintah desa dalam mengantisipasi perkembangan zaman memerlukan kemampuan sumberdaya untuk membuat keputusan yang bijaksana. Proses pengambilan keputusan yang rasional akan membantu pemerintah desa dalam menghadapi kompleksitas perubahan di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memiliki wawasan yang mendalam, analisis yang cermat, dan pemahaman yang baik terhadap dinamika sosial kemasyarakatan di desa.

Desa Cikeruh, yang terletak di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, memasuki fase perkembangan yang memerlukan perhatian khusus terhadap struktur kelembagaan desa. Sebagai wilayah yang berkembang, penting untuk melibatkan upaya perbaikan dalam struktur kelembagaan desa guna meningkatkan efisiensi, partisipasi masyarakat, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pemahaman akan peran dan fungsi lembaga desa menjadi kunci dalam upaya perbaikan ini.

Desa Cikeruh memiliki berbagai lembaga desa yang diharapkan dapat menjadi pilar-pilar penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengembangan struktur kelembagaan desa dapat memberikan dasar yang lebih kuat untuk efisiensi administratif dan operasional. Langkah ini akan memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab lembaga desa dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, mendukung kelancaran proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pengembangan kelembagaan desa memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Berbagai penelitian menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan desa dalam menghadapi berbagai tantangan kontemporer (Winarni, E. D. 2020). Tata kelola desa yang efektif memerlukan kolaborasi antara perangkat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga daerah (Kamuli, et al 2021). Pelaksanaan Undang-Undang Desa memerlukan dukungan dari lembaga pemerintahan desa dan strategi pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan potensi daerah. Penguatan kelembagaan desa bertujuan untuk mewujudkan desa yang mandiri, berciri khas, dan memiliki pengakuan atas hak-hak historisnya (Suharto, 2021). Namun, penguatan kelembagaan pemerintahan desa dapat berujung pada potensi otonomi desa yang membutuhkan kemandirian baik dari segi kelembagaan maupun masyarakat agar dapat terwujud. Untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan, penting untuk fokus pada pembangunan struktur dan budaya kelembagaan desa yang transparan, akuntabel, profesional, dan responsif.

Pentingnya pengembangan fungsi kelembagaan desa di Desa Cikeruh tidak hanya terkait dengan aspek efisiensi dan partisipasi, tetapi juga dengan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Desa Cikeruh dapat mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui kelembagaan desa yang dapat beroperasi secara optimal. Oleh karena itu, upaya perbaikan struktur kelembagaan desa di Desa Cikeruh menjadi landasan penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang komprehensif. Winarwan (2021) menekankan perlunya penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan, sementara Bembridge (1988) dan Duvel (1999) menyoroti pentingnya organisasi administratif dan struktur kelembagaan yang terdesentralisasi dan terkoordinasi yang memfasilitasi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Angelia (2020) lebih jauh menggarisbawahi peran strategis lembaga masyarakat sebagai mitra dalam proses pembangunan partisipatif. Studi-studi ini secara kolektif menggarisbawahi pentingnya peran struktur kelembagaan desa dalam mencapai tujuan pembangunan yang komprehensif.

Pengakuan Jatinangor sebagai kawasan pendidikan tinggi melibatkan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat termasuk Desa Cikeruh. Transformasi ini tidak hanya

PENGEMBANGAN FUNGSI KELEMBAGAAN DESA
(STUDI PADA DESA CIKERUH KABUPATEN SUMEDANG)

(Irfan Setiawan)

bersumber dari komunitas akademis, tetapi juga dari pergeseran aktivitas perdagangan dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. Akibatnya, perubahan ini menjadi faktor utama yang memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi di kawasan tersebut (Setiawan et al, 2015).

Tata ruang di desa-desa di Kecamatan Jatinangor mengalami degradasi yang mencolok akibat pembangunan yang terjadi tanpa perencanaan yang matang. Fenomena ini mencakup pembangunan bangunan tanpa pola yang jelas, perumahan padat, ketidakteraturan tempat kos, kawasan kumuh, jalanan yang sempit dan cenderung macet, serta penumpukan sampah yang belum mendapatkan solusi yang memadai. Kondisi lingkungan yang semakin memburuk menjadi tantangan serius yang harus diatasi untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan akademis dan pelestarian lingkungan. Hal tersebut dijelaskan Beale (1970) yang menggarisbawahi dampak tekanan populasi terhadap tekanan lingkungan, khususnya di negara-negara berkembang, dan menyerukan integrasi kebijakan kependudukan dan lingkungan. Re (1988) lebih jauh menekankan hubungan timbal balik antara penduduk dan lingkungan, menekankan perlunya integrasi penuh ke dalam strategi pembangunan nasional.

Dampak perubahan tata ruang Jatinangor di Desa Cikeruh tidak hanya menciptakan tantangan fisik, tetapi juga menciptakan pergeseran dinamika sosial dan ekonomi. Aktivitas mahasiswa dan kebutuhan sekitarnya memunculkan adaptasi di sektor perdagangan dan jasa, yang pada gilirannya memengaruhi pola konsumsi dan kebutuhan infrastruktur. Pentingnya perencanaan ruang oleh Desa Cikeruh yang terarah menjadi semakin nyata, dengan tujuan untuk mengatasi masalah ketidakteraturan yang muncul akibat pertumbuhan yang tidak terkoordinasi.

Fenomena lingkungan yang mengalami degradasi di Jatinangor membutuhkan tindakan tegas dan terencana untuk memulihkan keberlanjutan. Tata ruang yang kurang teratur, dan penumpukan sampah, (jabarekspres.com, 2021) dan pembangunan berkelanjutan menjadi langkah-langkah penting untuk menciptakan kawasan yang seimbang antara kegiatan pendidikan tinggi, kehidupan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Meluapnya Sungai Cikeruh memberikan dampak luapan lumpur dan sampah sisa banjir memenuhi areal perkampungan yang berdampak pada 25 KK di wilayah Cikeruh (tribunnews.com, 2021).

Beberapa hasil identifikasi potensi dan masalah wilayah RW06, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor yang diuraikan Budi Sutrisno (2017) dalam artikelnya sebagai berikut:

- 1) Aspek Olahraga, RT 02 dan 03 yang belum memiliki lapangan olahraga, kemudian pada RT 1 lapangan futsal dan bulutangkis perlu disewa lebih dulu, dimana penggunaannya tidak dapat rutin karena antrian.
- 2) Aspek Kesenian, walaupun terdapat fasilitasnya namun kegiatan tidak dilakukan secara rutin, namun hanya pada kegiatan seremonial seperti perayaan Kemerdekaan RI saja.
- 3) Aspek Kesehatan, pengelolaan sanitasi lingkungan masih, kurang baik dimana air limbah domestik dibuang ke selokan, bank sampah tersebut hanya digunakan oleh beberapa orang saja, dan pos pelayanan kesehatan, warga memanfaatkan klinik desa yang berjarak hanya 500 m.
- 4) Aspek Infrastruktur, ketika musim kemarau ketersediaan air mulai menipis, dan warga harus menampung air ke dalam toren air dan menggunakannya secara bergiliran, Hal tersebut terkadang memicu perselisihan antar warga yang ingin menggunakan air tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, pengembangan kelembagaan desa memegang peranan penting dalam mendukung masyarakat setempat dan memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif. Sebagaimana hasil riset Winarni (2020) yang menunjukkan bahwa lembaga desa menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi dan globalisasi, sekaligus mempertahankan karakteristik uniknya. Penguatan kelembagaan ini sangat penting untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dan memberdayakan aparatur desa agar lebih memahami peran dan tanggung jawabnya (Kamuli, 2021). Kelembagaan desa berperan penting dalam mendukung inisiatif pariwisata kreatif dan pengembangan usaha kecil dan menengah

PENGEMBANGAN FUNGSI KELEMBAGAAN DESA
(STUDI PADA DESA CIKERUH KABUPATEN SUMEDANG)

(Irfan Setiawan)

yang berkelanjutan, meskipun pendampingan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan struktur organisasi dan perencanaan strategisnya (Isa, et al, 2023). Pengembangan kelembagaan desa memainkan fungsi penting dalam memastikan penanganan pada beberapa aspek tersebut di atas. Kelembagaan desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembangunan dan pelayanan yang merata, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kelembagaan desa bukan hanya sebagai entitas administratif, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, kelembagaan desa dapat menjadi motor penggerak untuk pembangunan berkelanjutan dan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif. Desa Cikeruh memegang harapan besar terhadap berbagai lembaga desa yang ada, menganggapnya sebagai pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya beragam lembaga, diharapkan dapat terbentuk suatu kerangka kerja yang solid untuk mendukung dan memajukan kehidupan masyarakat desa. Lembaga-lembaga ini diharapkan dapat memainkan peran kunci dalam pembangunan dan pelayanan yang menyeluruh. Selain efisiensi administratif, peningkatan struktur kelembagaan desa juga berperan penting dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat. Dengan merancang sistem yang mempromosikan partisipasi, masyarakat Desa Cikeruh dapat lebih terlibat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Langkah ini akan menciptakan iklim partisipatif yang dapat memperkuat keterlibatan warga dalam mengidentifikasi kebutuhan lokal dan merencanakan program pembangunan yang lebih sesuai.

Peran aktif kelembagaan desa di Desa Cikeruh menjadi elemen krusial dalam menghadapi berbagai kendala yang muncul. Melalui keterlibatan yang proaktif, kelembagaan desa dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa. Sinergi yang terbentuk dari kerjasama ini diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, menciptakan solusi yang inklusif dan berdaya guna.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, kelembagaan desa memegang tanggung jawab besar dalam memastikan pembangunan dan pelayanan yang merata di Desa Cikeruh. Dengan mengambil peran yang proaktif, kelembagaan desa dapat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan dan program yang diimplementasikan.

Penelitian mengenai pengembangan fungsi kelembagaan desa sangat diperlukan karena kelembagaan desa memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini sangat penting untuk mempelajari dampak perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi akibat pengakuan Jatinangor sebagai kawasan pendidikan tinggi. Adaptasi kelembagaan desa dalam menghadapi tekanan populasi, degradasi lingkungan, dan dinamika ekonomi baru perlu dianalisis secara komprehensif. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana pengembangan kelembagaan desa dapat menjadi solusi untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan uraian fenomena tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Pengembangan fungsi kelembagaan desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang” Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi kebutuhan konkret masyarakat Desa Cikeruh dan diformulasikan konsep pengembangan fungsi kelembagaan desa yang sesuai. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Pengembangan fungsi kelembagaan desa di Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan berkualitas. Dalam upaya ini, tiga lembaga kunci ditempatkan pada peran sentral, yaitu pemerintah

desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Ketiganya harus bekerja bersama dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Veblen mendefinisikan kelembagaan sebagai sekumpulan norma dan kondisi-kondisi ideal yang direproduksi melalui kebiasaan generasi demi generasi (Yustika 2013:43). Budiharsana (2017) menegaskan bahwa lembaga adalah tatanan atau himpunan aturan dalam masyarakat yang diciptakan untuk memfasilitasi koordinasi antarpihak, sehingga anggota dapat bekerjasama mencapai tujuan kolektif. Lembaga menyediakan batasan dan struktur yang jelas, sehingga setiap individu mengetahui peran dan tanggung jawabnya.

Fungsi kelembagaan merupakan konsep fundamental yang merujuk pada keseluruhan aturan, norma, dan struktur di masyarakat yang mengarahkan perilaku kolektif untuk mencapai tujuan bersama (Melkiana, 2018; Budiharsana, & Heywood, 2017). Budiharsana (2017) menambahkan, lembaga berfungsi memudahkan koordinasi, yakni memfasilitasi kerjasama dan sinkronisasi antarpelaku. Fungsi kelembagaan juga dapat mencakup pembagian tugas yang jelas, stabilitas organisasi, serta pengendalian sosial (*social control*) bagi anggota masyarakat. Dengan demikian lembaga berperan sebagai pedoman normatif bagi tindakan individu, dimana fungsi kelembagaan mencakup pengaturan norma sosial dan prosedur operasional yang mengikat anggota, sehingga lembaga menjadi kerangka acuan dan wadah interaksi sosial.

Pengembangan fungsi kelembagaan (*institutional strengthening*) merupakan upaya untuk meningkatkan kapabilitas dan efektivitas lembaga agar lebih responsif terhadap perubahan. Konsep ini meliputi restrukturisasi organisasi, pembentukan fungsi baru, serta penyesuaian norma yang dinamis. Munir (2001) mendefinisikan penguatan kelembagaan sebagai perencanaan ulang organisasi publik dan penyusunan pedoman baru, termasuk memperkokoh pola normatif (hubungan kerja), membentuk fungsi-fungsi dan layanan baru yang dihargai masyarakat, serta menciptakan fasilitas yang menghubungkan teknologi dengan lingkungan sosial.

Dalam pemerintahan desa, fungsi kelembagaan diwujudkan pada struktur formal desa dan lembaga kemasyarakatan lokal. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa tugas pokok kelembagaan pemerintahan desa meliputi empat bidang utama: penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Yuningsih, et al, 2022). Artinya, lembaga desa harus menjalankan fungsi birokrasi sekaligus mengaktualisasikan peran sosialnya. Sebagai contoh, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai lembaga legislatif desa yang menyusun dan mengesahkan peraturan desa, serta memfasilitasi Musyawarah Desa. Pada Musyawarah Desa tersebut, BPD dan pemerintah desa bersama unsur masyarakat mendiskusikan kebijakan strategis. Proses ini bertujuan meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat (Uway, et,al, 2024). Berkaitan hal tersebut terlihat bahwa fungsi kelembagaan desa meliputi penguatan proses musyawarah, keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan, serta pembentukan mekanisme kolaborasi antar-lembaga desa, demi mewujudkan tata kelola desa yang efektif.

Hubungan antara pengembangan kelembagaan secara umum dengan fungsi kelembagaan desa terletak pada penerapan prinsip-prinsip penguatan di tingkat lokal. Misalnya, Mahmud dkk. (2021) melaporkan bahwa pelatihan penguatan kelembagaan di Desa Bongkudai Barat berhasil meningkatkan kesadaran dan terlaksana partisipasi, kerjasama dan gotong royong antara aparat desa, BPD, tokoh agama dan pemuda dalam pengembangan kelembagaan desa. Hasil ini menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan desa bertumbuh ketika struktur formal dan masyarakat desa saling mendukung. Dalam kerangka kerja tata kelola desa, pengembangan fungsi kelembagaan berarti memperkuat relasi normatif (seperti kebersamaan dan gotong royong), menjabarkan fungsi kelembagaan secara nyata (misalnya tugas legislasi BPD dan perencanaan desa), serta memfasilitasi teknologi dan informasi desa agar lebih akuntabel. Dengan konsep ini, lembaga desa yang lebih solid akan mampu menjalankan fungsi-fungsi legislasi, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat dengan lebih baik.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa fungsi kelembagaan dan pengembangannya saling berkaitan erat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kelembagaan yang efektif mendorong tercapainya

tujuan pembangunan desa, sedangkan program pengembangan kelembagaan diharapkan membangun kapasitas organisasi dan partisipasi warga. Sebagaimana dikemukakan para ahli, kelembagaan bertindak sebagai kerangka normatif dan pedoman perilaku, sehingga memperkuatnya berarti memperkuat koordinasi dan kohesi sosial. Di lingkungan desa, hal ini diwujudkan dengan memperkuat lembaga-lembaga desa (seperti perangkat desa, BPD, lembaga adat) sesuai fungsi utamanya. Dengan penataan ulang struktur, pengembangan kapasitas SDM, dan penegakan norma yang adaptif (Tinov, & Handoko, 2017).), lembaga desa dapat menjalankan peran legislatif, eksekutif, dan pemberdayaan secara sinergis. Akhirnya, pemikiran ini menekankan bahwa baik fungsi maupun pengembangan kelembagaan harus diarahkan untuk mendukung pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, guna mencapai visi desa mandiri yang sejahtera. Gambar kerangka pemikiran dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE

Desain penelitian deskriptif kualitatif menjadi pilihan peneliti untuk memberikan gambaran dan uraian kondisi atau fenomena yang terjadi berkaitan pada pengembangan kelembagaan desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa secara akurat, faktual, dan sistematis mengenai fakta dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Proses penelitian kualitatif menyangkutkan usaha-usaha tertentu, layaknya memberikan pertanyaan dan membentuk prosedur, menghimpun data dari informan hal-hal yang spesifik, kemudian menganalisa data yang berawal dari thema-thema yang spesifik ke thema-thema general, dan menginterpretasikan arti data. Creswell (2014) yang menjelaskan yakni metodologi kualitatif bisa dilaksanakan melalui beberapa pendekatan diantaranya: penelitian naratif, fenomenologi, studi kasus, grounded theory, etnografi, analisis wacana, dan partisipatoris.

Penelitian mengenai pengembangan kelembagaan desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, dianalisis dengan memadukan pemikiran Nurcholis, Hanif, 2014, dan Sumarti, T. dkk. (2008) dengan kebijakan pemerintah pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga membentuk dimensi-dimensi sebagai berikut:

Tabel 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Konsep	Dimensi	Sub dimensi
Pengembangan Fungsi Kelembagaan Desa	Penggerak Utama Institusi-institusi di Desa	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa (Pelatihan dan Pendidikan, dan Penyediaan dana dan sarana prasarana b) Penguatan Koordinasi Antar Lembaga Desa (Forum komunikasi dan koordinasi, dan jaringan informasi dan komunikasi
	Penyelenggara Pemerintahan Desa	a. Pelayanan publik (penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat desa) b. Pembangunan desa, c. Pemberdayaan Masyarakat
	Wadah Partisipasi Masyarakat Desa	a. Keaktifan dalam pengambilan keputusan b. Keterlibatan dalam pelaksanaan pembangunan

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dokumen, focus group discussion, dan disempurnakan dengan triangulasi data (Simangunsong, 2017). Peneliti menentukan sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini untuk memperoleh informasi dan data yang berhubungan pada penelitian Jenis data yang dipergunakan oleh penulis di penelitian ini berasal dari data primer, yakni seluruh hasil data penelitian yang didapatkan dari pengamatan, dan wawancara untuk memahami persoalan yang berhubungan pada penelitian ini. Jenis data yang dapat dipergunakan pada penelitian yang meliputi dari dua jenis, yakni: *pertama*, Data primer, yakni data yang ditemui secara langsung melalui wawancara kepada *key informan* dan hasil mengobservasi data. Data primer penelitian ini didapatkan melalui pejabat pada lokasi penelitian memiliki kaitan dengan Pengembangan kelembagaan desa. *Kedua*, data sekunder, yakni data yang didapatkan melalui hasil dokumentasi, arsip, dan laporan, serta data lainnya yang sejalan pada masalah penelitian. Pengumpulan Data sekunder dari dokumen internal di kantor kecamatan dan kantor sekretariat kabupaten serta berbagai eksternal data dari sumber online.

Guna memperoleh informasi yang jelas tentang pengembangan kelembagaan desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, Peneliti mengambil data di lokasi Desa Cikeruh. Sebagai *Key Informan* dalam penelitian peneliti ini adalah Kepala Desa Cikeruh dengan pertimbangan bahwa beliau merupakan orang yang mengetahui secara jelas mengenai penyelenggaraan pemerintahan sebagai lokasi penelitian. Selain orang yang terlibat langsung pada pembahasan kelembagaan desa, penulis juga menentukan subyek-subyek penelitian dari 16 orang masyarakat di lokasi penelitian, yang beraktivitas di desa cikeruh, seperti petani, pelaku usaha, buruh dan warga masyarakat di sekitar Desa Cikeruh.

Dalam analisis data, proses pengorganisasian data, pengorganisasian ke dalam pola, kategori dan area deskripsi yang luas untuk mengidentifikasi tema dan mengembangkan proses berdasarkan data yang disarankan. Tujuan klasifikasi informasi adalah untuk menyederhanakan informasi ke dalam format yang mudah dibaca dan dipahami sehingga dapat ditarik kesimpulan yang akurat dan sistematis.

Analisis data mempunyai tujuan untuk mensesederhanakan data menjadi bentuk yang gampang dipahami dan ditafsirkan sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi sistematis dan akurat melalui Membuat dan menyimpan data untuk analisis, Pengkodean pemrosesan objek/data menjadi segmen teks sebelum interpretasi (Rossman, *et al*, 1998). Selanjutnya, gunakan proses pengeditan untuk membuat beberapa tema

atau kategori, Mendemonstrasikan bagaimana mengulang deskripsi dan tema ini dalam teks/laporan situasi, dan Langkah terakhir peneliti mengkonfirmasi apakah temuannya mengkonfirmasi atau menyangkal data sebelumnya Creswell (2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Kelembagaan Desa Di Desa Cikeruh Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan.

Pembahasan ini mengkaji secara mendalam fungsi kelembagaan desa di Desa Cikeruh dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Data yang dikumpulkan akan mencakup berbagai aspek, seperti efektivitas program yang dijalankan, partisipasi masyarakat, serta kendala yang dihadapi oleh lembaga-lembaga tersebut. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi peningkatan kinerja kelembagaan desa, tidak hanya di Desa Cikeruh, tetapi juga di desa-desa lain di Indonesia.

A. Penggerak Utama Institusi-institusi di Desa.

Desa Cikeruh, seperti halnya desa-desa lain di Indonesia, memiliki institusi-institusi desa yang berfungsi sebagai motor penggerak dalam penyelenggaraan desa. Institusi-institusi desa mencakup berbagai lembaga formal yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta lembaga non-formal yang muncul dari inisiatif masyarakat setempat. Lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa berbagai program dan kebijakan pemerintah desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

1) Kapasitas Kelembagaan Desa, dan Penyediaan dana dan sarana prasarana

Kapasitas kelembagaan desa merupakan aspek krusial dalam menunjang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Desa Cikeruh. Lembaga formal seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Karang Taruna berperan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program desa. BPD berfungsi sebagai saluran aspirasi masyarakat dan pengawas kinerja pemerintah desa, sedangkan LPM fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pengembangan usaha kecil. Pada tahun 2023, BPD telah mengadakan 12 pertemuan resmi, sementara LPM mengorganisir lebih dari 15 kegiatan pemberdayaan. Meski terdapat capaian positif, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran masih dihadapi oleh kedua lembaga ini.

Selain lembaga formal, lembaga non-formal seperti kelompok tani dan ibu-ibu PKK juga berperan mendukung program-program desa. Kelompok tani aktif dalam penyuluhan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan produktivitas pertanian, sedangkan kelompok PKK aktif dalam program posyandu dan kesehatan keluarga. Namun, tantangan yang dihadapi lembaga non-formal ini termasuk kurangnya akses terhadap teknologi dan keterbatasan dukungan finansial. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, dukungan anggaran, dan pengembangan sumber daya manusia menjadi penting agar lembaga-lembaga tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan optimal.

2) Koordinasi Antar Lembaga Desa (Forum komunikasi dan koordinasi, dan jaringan informasi dan komunikasi

Desa Cikeruh memiliki potensi besar untuk berkembang melalui kerjasama yang kuat antar lembaga desa, seperti BPD, LPM, dan Karang Taruna. Salah satu upaya penting adalah pembentukan forum komunikasi dan koordinasi sebagai wadah untuk bertukar informasi, mendiskusikan masalah, dan merumuskan solusi bersama. Selain itu, penggunaan jaringan WhatsApp telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa hingga 20% pada tahun 2023. Namun, meski ada inisiatif positif, Indeks Kapasitas Desa (IKD) masih rendah di angka 0,56, menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar lembaga masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal teknologi dan keterampilan informasi.

Meskipun forum koordinasi desa rutin diadakan setiap bulan dan berhasil mengoordinasikan 20 program lintas lembaga pada 2023, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan perbedaan prioritas antar lembaga masih menghambat efektivitas program. Untuk mengatasi ini, peningkatan fasilitas teknologi dan pelatihan manajemen konflik sangat diperlukan. Dengan investasi dalam teknologi dan pengembangan kapasitas lembaga, diharapkan koordinasi antar lembaga di Desa Cikeruh dapat berjalan lebih efisien, yang pada akhirnya akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Penyelenggara Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan melalui tiga pilar utama tata kelola pemerintahan: pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar ini tidak hanya saling terkait, tetapi juga berfungsi sebagai landasan yang sangat penting bagi pengelolaan dan pengembangan desa yang efektif dan efisien. Ketiga pilar ini menciptakan sinergi yang positif dalam upaya membangun desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

1) Pelayanan publik

Pelayanan pemerintahan mencakup berbagai aspek, seperti penyediaan layanan administrasi yang cepat dan transparan bagi masyarakat, termasuk pengeluaran akta kelahiran, akta kematian, dan izin usaha. Misalnya, dengan adanya layanan online, masyarakat dapat mengakses informasi dan melakukan pengurusan dokumen tanpa harus datang langsung ke kantor desa, sehingga menghemat waktu dan tenaga. Desa Cikeruh melaksanakan pelayanan pemerintahan melalui tiga jenis administrasi penting: administrasi umum, penduduk, dan pembangunan. Administrasi umum mencatat aktivitas pemerintahan desa, seperti pertemuan rutin dan surat-menyurat, yang telah diimplementasikan oleh 85% desa di Indonesia. Administrasi penduduk mencatat informasi seperti kelahiran dan migrasi, dengan jumlah penduduk Desa Cikeruh mencapai 7.991 jiwa pada tahun 2023. Administrasi pembangunan mencakup pencatatan proyek seperti pembangunan jalan sepanjang 2 km dan renovasi sekolah dasar pada tahun 2023, yang membantu memantau progres pembangunan desa.

Meskipun sudah ada upaya digitalisasi, pengelolaan surat di Desa Cikeruh masih banyak dilakukan secara manual, berbeda dengan desa lain yang telah menggunakan *e-office*. Hal ini mengakibatkan proses pelayanan menjadi lebih lambat dan berisiko kehilangan dokumen. Salah satu penyebab utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi dan anggaran. Hanya 45% rumah tangga di Desa Cikeruh yang memiliki akses internet, dan alokasi dana untuk pengembangan teknologi informasi hanya mencakup 10% dari anggaran desa 2023. Selain itu, 60% staf desa merasa kesulitan beradaptasi dengan sistem *e-office*.

Selain masalah teknologi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi tantangan bagi Desa Cikeruh dalam mengelola administrasi dan pemberdayaan masyarakat. Hanya 40% perangkat desa yang pernah mengikuti pelatihan formal, menyebabkan proses administrasi tidak optimal. Keterbatasan anggaran juga membuat banyak program pemberdayaan masyarakat harus ditunda atau dibatalkan, dengan hanya 60% dari dana yang diperlukan dapat dialokasikan pada tahun 2023. Hambatan lainnya adalah kurangnya koordinasi antar lembaga desa, di mana 30% anggota lembaga desa melaporkan kesulitan berkoordinasi, yang menghambat pelaksanaan program.

2) Pembangunan Desa

Pembangunan desa berfokus pada infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini bisa meliputi pembangunan jalan, jembatan, serta sarana pendidikan dan kesehatan. Sebagai contoh, pembangunan sebuah puskesmas di desa dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan warga desa. Pembangunan di Desa Cikeruh berjalan dengan baik melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa), yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat hingga 70% pada tahun 2023. Dana Desa menjadi sumber utama pembiayaan, dengan alokasi

sebesar Rp1,069 miliar pada tahun 2023 digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan sepanjang 2 km dan renovasi sekolah, serta program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan. Program-program ini berhasil meningkatkan kesejahteraan warga, termasuk 150 peserta pelatihan dan 20 usaha kecil yang mengalami peningkatan produktivitas hingga 25%.

Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi antar lembaga desa. Hanya 40% perangkat desa yang pernah mengikuti pelatihan formal, yang berdampak pada kurang optimalnya administrasi. Selain itu, komunikasi yang kurang efektif antar lembaga, serta anggaran yang terbatas membuat beberapa program pemberdayaan masyarakat tertunda atau dibatalkan. Pada tahun 2023, hanya 60% dari total kebutuhan dana yang dapat dialokasikan, menghambat pembangunan yang direncanakan.

Meskipun demikian, dengan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan anggaran yang lebih baik, pembangunan di Desa Cikeruh dapat terus ditingkatkan. Melalui administrasi yang lebih baik, partisipasi masyarakat yang konsisten, serta koordinasi antar lembaga yang efektif, Desa Cikeruh dapat menjadi contoh desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat berperan dalam meningkatkan kapasitas dan keterampilan warga agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Program pelatihan keterampilan seperti pelatihan pertanian, kerajinan tangan, atau kewirausahaan dapat membantu masyarakat untuk mandiri secara ekonomi. Pemberdayaan masyarakat Desa Cikeruh dalam pembangunan desa sangat signifikan, terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek. Masyarakat tidak hanya menerima hasil kebijakan, tetapi juga terlibat langsung dalam menentukan prioritas pembangunan, seperti pada pembangunan gorong-gorong yang didukung oleh kontribusi tenaga masyarakat. Selain itu, keterlibatan mereka dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) mencapai 70% pada tahun 2023, menunjukkan tingginya partisipasi dalam menentukan arah pembangunan.

C. Wadah Partisipasi Masyarakat Desa

Partisipasi ini berdampak positif pada efisiensi dan efektivitas pembangunan. Dukungan tenaga masyarakat membantu menekan biaya proyek, sehingga anggaran dapat dimanfaatkan lebih optimal. Selain itu, keterlibatan ini menciptakan rasa memiliki yang kuat terhadap pembangunan desa, yang memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Cikeruh secara keseluruhan.

Namun, ada tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya keterampilan perangkat desa dalam manajemen pembangunan dan kendala komunikasi antar lembaga. Meskipun sudah ada forum komunikasi seperti WhatsApp, koordinasi yang efektif masih menjadi hambatan. Meski demikian, dengan komitmen dari semua pihak, Desa Cikeruh memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi contoh partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengembangan Fungsi Kelembagaan Desa Di Desa Cikeruh.

Pengembangan fungsi kelembagaan desa di Desa Cikeruh menghadapi beberapa kendala utama, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas aparatur desa. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan hanya 40% anggota lembaga desa yang pernah mengikuti pelatihan formal, sehingga banyak aparatur desa belum memiliki kompetensi yang memadai dalam administrasi dan manajemen desa. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan program desa sering tidak berjalan optimal. Selain itu, keterbatasan dana dan sarana prasarana turut menjadi hambatan, seperti pada kasus RW 6 di mana kegiatan kewirausahaan terhenti karena kurangnya permodalan dan pembinaan. Menurut Kepala Desa Cikeruh, hanya 60% dari total dana yang dibutuhkan untuk program pemberdayaan masyarakat yang dapat dialokasikan pada tahun 2023, menyebabkan banyak program tertunda atau dibatalkan.

PENGEMBANGAN FUNGSI KELEMBAGAAN DESA
(STUDI PADA DESA CIKERUH KABUPATEN SUMEDANG)

(Irfan Setiawan)

Kurangnya koordinasi antar lembaga desa juga menjadi kendala signifikan dalam pengembangan kelembagaan. Miskomunikasi dan ketidaksepakatan sering terjadi, meskipun sudah ada upaya membangun jaringan komunikasi melalui platform seperti WhatsApp. Survei internal tahun 2023 menunjukkan bahwa 30% anggota lembaga desa mengalami kesulitan dalam berkoordinasi, yang berdampak pada inefisiensi program desa. Tanpa perbaikan pada aspek sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi, pengembangan kelembagaan desa di Desa Cikeruh akan sulit mencapai potensi penuh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor lain yang menjadi kendala adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan desa. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum aktif berpartisipasi dalam kegiatan desa. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti: kurangnya informasi, kurangnya kesadaran, dan kurangnya motivasi.

Kendala-kendala tersebut dapat berdampak negatif bagi pengembangan fungsi kelembagaan desa khususnya di Desa Cikeruh, seperti:

- Terhambatnya pelaksanaan tugas dan fungsi desa: Kurangnya kapasitas aparatur desa, dana, dan sarana prasarana, serta partisipasi masyarakat dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi desa.
- Rendahnya kualitas pelayanan publik: Kurangnya kapasitas dan koordinasi antar lembaga desa dapat menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
- Lambatnya pembangunan desa: Kurangnya dana dan partisipasi masyarakat dapat menyebabkan lambatnya pembangunan desa.
- Rendahnya kesejahteraan masyarakat: Semua faktor di atas dapat berakibat pada rendahnya kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk mengatasi kendala di Desa Cikeruh, diperlukan langkah strategis seperti pelatihan dan pengembangan kapasitas anggota lembaga desa, perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, serta peningkatan komunikasi dan koordinasi melalui pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi manajemen proyek. Dengan komitmen bersama, penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan lebih optimal, memperbaiki kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dengan administrasi yang baik, partisipasi aktif masyarakat, dan koordinasi lembaga yang efektif, Desa Cikeruh dapat menjadi model bagi desa lain dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Konsep Pengembangan Fungsi Kelembagaan Desa Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif Dan Efisien

A. Pengembangan Institusi-Institusi di Desa

Pengembangan institusi-institusi desa sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Desa Cikeruh, dengan potensinya, memiliki peluang besar untuk berkembang, namun keberhasilan tersebut membutuhkan peningkatan dalam berbagai aspek kelembagaan. Kapasitas kelembagaan tidak hanya mencakup kemampuan administratif, tetapi juga meliputi perencanaan, pengorganisasian, manajemen, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Aspek kunci dalam penguatan kelembagaan desa meliputi kepemimpinan yang efektif, manajemen yang baik, peningkatan profesionalitas staf desa melalui pelatihan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Partisipasi ini tidak hanya memastikan keterwakilan aspirasi masyarakat, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi tata kelola desa.

Di samping itu, pemahaman yang baik tentang regulasi dan hukum desa, optimalisasi sumber daya manusia dan keuangan, serta jejaring kerja sama dengan pihak eksternal menjadi faktor penting dalam penguatan kapasitas kelembagaan desa. Desa perlu membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah,

perguruan tinggi, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan akses pada pengetahuan, teknologi, dan sumber daya yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui evaluasi berkala terhadap capaian dan tantangan, serta rencana pembangunan yang terukur, desa dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat kemajuan pembangunan desa. Pengembangan kapasitas kelembagaan desa merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk memperkuat kemampuan desa dalam menghadapi tantangan pembangunan di era globalisasi (Winarni, 2020). Dalam hal perkembangan teknologi informasi dimana Desa Cikeruh termasuk di wilayah pendidikan Jatinangor, desa juga perlu mengembangkan kapasitas dalam mengelola informasi dan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi desa, komunikasi publik, dan penyediaan layanan publik secara online dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola desa. Ini melibatkan peningkatan kemampuan dalam mengelola sumber daya, mengembangkan infrastruktur, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat desa telah terbukti efektif dalam mengaktualisasikan partisipasi masyarakat sebagai sumber daya lokal yang potensial (Nurasa, 2016)). Namun, masih terdapat hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan sarana pendukung (Buchari et al., 2017). Penguatan kapasitas aparatur desa juga penting untuk meningkatkan daya saing daerah, yang memerlukan standar kompetensi yang diakui secara global (Parjaman, et al 2019). Oleh karena itu, salah satu aspek penting dalam pengembangan kapasitas kelembagaan desa adalah pelatihan dan pendidikan bagi aparatur desa. Aparatur desa sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang memadai. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan, seperti:

- Pelatihan tentang undang-undang desa, peraturan daerah, dan peraturan desa lainnya.
- Pelatihan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa.
- Pelatihan tentang pengelolaan keuangan desa.
- Pelatihan tentang pelayanan publik desa.
- Pelatihan tentang komunikasi dan membangun hubungan dengan masyarakat.

Selain pelatihan dan pendidikan, pengembangan kapasitas kelembagaan desa juga memerlukan penyediaan dana dan sarana prasarana yang memadai. Dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah perlu dikelola secara transparan dan akuntabel, serta digunakan untuk mendukung program-program pembangunan desa yang prioritas. Sarana prasarana desa, seperti kantor desa, balai desa, dan infrastruktur desa lainnya, juga perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang kelancaran aktivitas pemerintahan desa.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Indeks Kapasitas Desa (IKD) Desa Cikeruh masih tergolong rendah, yaitu 0.56. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak ruang untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa. Dengan komitmen dan upaya yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak, seperti pemerintah desa, masyarakat desa, dan pihak swasta, pengembangan kapasitas kelembagaan desa Cikeruh dapat diwujudkan. Hal ini akan membawa dampak positif bagi kemajuan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di masa depan, beberapa langkah strategis dapat dilakukan. *Pertama*, pemerintah desa perlu meningkatkan investasi dalam pelatihan dan pendidikan keterampilan bagi anggota perangkat desa dan masyarakat umum. Pelatihan ini dapat mencakup manajemen proyek, keuangan desa, serta teknik partisipasi dan pengambilan keputusan yang efektif. *Kedua*, penting untuk memperkuat forum-forum partisipasi seperti Musrenbang Desa. Desa Cikeruh dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa. Dengan melibatkan lebih banyak warga desa, termasuk kaum muda dan perempuan, partisipasi dalam Musrenbang Desa dapat semakin ditingkatkan.

Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya pengembangan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan di Indonesia, sejalan dengan beberapa penelitian ahli lainnya seperti Nurasa (2016) yang menemukan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

PENGEMBANGAN FUNGSI KELEMBAGAAN DESA
(STUDI PADA DESA CIKERUH KABUPATEN SUMEDANG)

(Irfan Setiawan)

berhasil mewujudkan *partisipasi masyarakat sebagai sumber daya lokal yang potensial* dalam menyelesaikan permasalahan publik secara mandiri dan berkelanjutan. Begitu pula Asnuddin (2012) yang menekankan perlunya pendekatan partisipatif dalam pembangunan infrastruktur pedesaan, yang melibatkan masyarakat lokal sejak awal program untuk memperkuat modal sosial dan menciptakan rasa kepemilikan. Darwis dan Zulfan et al (2018) mengkaji peningkatan kapasitas pemimpin masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa partisipatif, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam hal kedekatan, kesetaraan, komitmen, kejujuran, objektivitas, dan lokalitas permasalahan.

Pengembangan kapasitas kelembagaan Desa Cikeruh merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat berkelanjutan bagi desa dan masyarakatnya. Dengan kelembagaan desa yang kuat dan mumpuni, Desa Cikeruh dapat menjadi desa yang mandiri, maju, dan sejahtera. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Cikeruh telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memajukan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakatnya. Melalui partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek pembangunan, masyarakat Desa Cikeruh tidak hanya mendapatkan infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga membangun kebersamaan dan solidaritas yang kuat di antara mereka.

B. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan hal yang krusial dalam hal pembangunan komunitas di Indonesia. Desa Cikeruh, seperti banyak desa lainnya, menghadapi tantangan dan peluang dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakatnya melalui pengembangan kapasitas kelembagaan. Terdapat tiga pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat desa yaitu pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, dengan fokus pada administrasi desa dan partisipasi masyarakat.

1) Pelayanan Pemerintahan

Pelayanan pemerintahan di Desa Cikeruh diintegrasikan melalui beberapa jenis administrasi yang mencakup administrasi umum, administrasi penduduk, dan administrasi pembangunan. Administrasi umum mencatat aktivitas pemerintahan sehari-hari seperti pertemuan rutin dan keputusan-keputusan penting, sementara administrasi penduduk mencatat data kependudukan seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Administrasi pembangunan memantau proyek-proyek infrastruktur dan program-program pembangunan lainnya.

Penerapan sistem administrasi umum di Desa Cikeruh, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2023, mencapai 85%, menunjukkan komitmen desa ini dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, tantangan terletak pada pengelolaan surat masuk dan keluar yang masih menggunakan metode konvensional, memperlambat efisiensi dan akurasi administrasi. Hal ini menjadi bukti bahwa meskipun ada kemajuan dalam administrasi umum, masih ada ruang untuk peningkatan melalui adopsi teknologi informasi seperti sistem *e-office* untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan.

2) Pembangunan Desa

Pembangunan di Desa Cikeruh didorong oleh keterlibatan masyarakat melalui proses Musrenbang Desa. Keikutsertaan yang tinggi dalam Musrenbang Desa pada tahun 2023 mencapai 70%, mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya merumuskan rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dana Desa yang diterima Desa Cikeruh sebesar Rp1.069.048.000,00 digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur yang sangat penting bagi pengembangan wilayah, seperti pembangunan jalan desa yang akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat, serta renovasi Taman Kanak-kanak yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi anak-anak. Proyek-proyek ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup warga desa.

Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi oleh desa ini tidak bisa diabaikan. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam pengelolaan administrasi desa,

yang sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang diterima dapat digunakan secara efektif dan efisien. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 40% dari anggota perangkat desa yang pernah mengikuti pelatihan formal, sementara sekitar 30% mengalami kesulitan dalam berkoordinasi dengan lembaga lain. Keterbatasan anggaran juga mempengaruhi pelaksanaan program, dengan hanya 60% dari dana yang diperlukan untuk program pemberdayaan masyarakat yang dapat dialokasikan. Selain itu, koordinasi yang kurang efektif antarlembaga desa sering kali menjadi hambatan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih program dan kurangnya sinergi dalam upaya pembangunan, sehingga hasil yang diharapkan tidak dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan usaha lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memperkuat kerjasama antar berbagai lembaga di desa.

3) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat di Desa Cikeruh didorong melalui berbagai program seperti pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha kecil. Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa (Musdes) meningkat sebesar 25% pada tahun 2023, menunjukkan tingkat kesadaran dan keterlibatan yang positif dalam proses pengambilan keputusan. Pelatihan keterampilan telah membantu beberapa warga untuk membuka usaha kecil, sementara pendampingan usaha kecil meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka.

Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga mempengaruhi efektivitas program pemberdayaan. Pelatihan yang kurang memadai bagi anggota perangkat desa dan kesulitan dalam berkoordinasi antar lembaga desa menghambat pelaksanaan program secara optimal. Pengelolaan dan alokasi dana yang tidak cukup memadai juga membatasi kemampuan Desa Cikeruh dalam meningkatkan infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Cikeruh menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek, tetapi juga menghadapi tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pentingnya administrasi desa yang baik, partisipasi aktif masyarakat, dan koordinasi efektif antar lembaga tidak boleh diabaikan. Penerapan teknologi informasi seperti sistem e-office bisa menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, sementara peningkatan kualitas pelatihan bagi anggota perangkat desa akan memperkuat kapasitas pengelolaan desa dalam jangka panjang.

Komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, lembaga masyarakat, dan warga, akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang untuk pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian, Desa Cikeruh dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya.

Berdasarkan Uraian di atas, terlihat bahwa Pemerintah Desa Cikeruh dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa secara efektif dan efisien, Desa Cikeruh perlu terus mengembangkan kapasitas kelembagaan melalui penguatan administrasi desa, peningkatan partisipasi masyarakat, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya. Para ahli lainnya telah mengkaji pendekatan tersebut secara terpisah yang terkait penguatan administrasi desa, peningkatan partisipasi masyarakat, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya. Hapsari (2021) mengkaji peningkatan kapasitas aparat desa untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan melalui bimbingan teknis dan pelatihan. Nurasa (2016) menganalisis program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk merevitalisasi kemandirian desa melalui pendanaan dan fasilitasi. Moeljono dan Alfiyanto (2020) menekankan metode pembelajaran dan tindakan partisipatif untuk meningkatkan keterampilan aparat desa dalam administrasi dan pelaporan keuangan. Vestikowati dkk. (2020) fokus pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa melalui pelatihan administrasi, yang bertujuan untuk membangun sistem tata kelola yang baik dan mengoptimalkan pelayanan publik. Dengan demikian, desa ini

tidak hanya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan, tetapi juga menggerakkan kemajuan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

C. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah sebuah konsep yang fundamental dalam konteks pembangunan lokal yang berkelanjutan. Kontribusi aktif masyarakat dalam proses pembangunan tidak hanya menjadi indikator keberhasilan pembangunan itu sendiri, tetapi juga mencerminkan tingkat keterlibatan, kepedulian, dan tanggung jawab bersama terhadap masa depan desa. Desa Cikeruh, sebagai studi kasus, menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakat dapat memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi.

a) Signifikansi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Cikeruh dapat dilihat dari beberapa perspektif yang saling terkait. Pertama, partisipasi masyarakat tidak hanya berarti mereka menjadi penerima kebijakan pembangunan, tetapi lebih dari itu, mereka aktif terlibat dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Contoh konkretnya adalah pembangunan gorong-gorong sebagai bagian dari sistem drainase desa. Masyarakat tidak hanya mendukung proyek ini secara moral, tetapi juga secara fisik turut serta dalam pelaksanaannya. Sumbangan tenaga dan waktu dari masyarakat membantu mengurangi biaya pelaksanaan proyek dan meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian pembangunan infrastruktur yang krusial bagi kesehatan lingkungan dan kenyamanan hidup mereka.

b) Dampak Positif Partisipasi Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat Desa Cikeruh dalam pembangunan tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik semata, tetapi juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Secara ekonomis, partisipasi ini membantu memperkuat sektor ekonomi lokal melalui program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha kecil. Dengan melibatkan masyarakat dalam pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, dan teknologi informasi, Desa Cikeruh berhasil meningkatkan kemampuan ekonomi warganya. Hasil dari pelatihan ini tidak hanya terlihat dalam peningkatan pendapatan rumah tangga, tetapi juga dalam peningkatan jumlah usaha kecil yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi desa secara keseluruhan (DPMD, 2023). Hal ini bukan hanya mengubah paradigma masyarakat dari penerima manfaat menjadi agen perubahan, tetapi juga meningkatkan solidaritas sosial di antara mereka. Kebersamaan yang terbangun dari proses partisipatif ini memperkuat jaringan sosial dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh di Desa Cikeruh (DPMD, 2023).

c) Tantangan dalam Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat

Meskipun partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Cikeruh telah memberikan banyak manfaat, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah masalah kapasitas dan keterampilan dalam mengelola pembangunan. BPS mencatat bahwa sebagian besar anggota perangkat desa membutuhkan pelatihan tambahan dalam manajemen dan administrasi pembangunan. Kurangnya keterampilan ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya secara efektif dan mengimplementasikan proyek-proyek pembangunan dengan baik. Meskipun sudah ada upaya untuk memfasilitasi komunikasi melalui platform seperti WhatsApp, namun masih terdapat kendala-kendala dalam implementasinya. Miskomunikasi atau ketidaksepakatan antar lembaga dapat memperlambat atau bahkan menghambat pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat sistem komunikasi dan koordinasi di tingkat desa agar memastikan semua pihak dapat bekerja sama secara efektif dalam mewujudkan tujuan pembangunan bersama.

Beberapa penelitian ahli juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di seluruh Indonesia. Harfis et al, (2019) mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat partisipasi, seperti terbatasnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Sepyah et al (2022) menekankan peran partisipasi masyarakat desa dalam memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan kualitas kebijakan publik, sekaligus mencatat tantangan seperti akses informasi dan kesenjangan sosial. Apriyani dan Arif (2019) menggambarkan keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa di Toyareka, Jawa Tengah, melalui pertemuan rutin dan kegiatan gotong royong. Studi-studi ini secara kolektif menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan lokal yang berkelanjutan dan menyoroti keberhasilan dan tantangan dalam mendorong pendekatan partisipatif yang sejalan dengan penelitian ini.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Cikeruh merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan lokal yang berkelanjutan. Melalui partisipasi aktif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan proyek pembangunan, masyarakat tidak hanya mendapatkan infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan membangun kebersamaan yang kokoh di komunitas mereka. Namun, untuk mengoptimalkan manfaat dari partisipasi ini, diperlukan investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sistem komunikasi dan koordinasi, serta peningkatan dukungan dari pemerintah desa dan lembaga terkait.

Dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, lembaga masyarakat, dan warga desa sendiri, Desa Cikeruh memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi contoh dalam penerapan prinsip partisipasi masyarakat yang efektif dalam pembangunan lokal. Melalui pembelajaran dari pengalaman Desa Cikeruh, desa-desa lain di Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fungsi kelembagaan desa di Desa Cikeruh, dapat disimpulkan bahwa kelembagaan desa sangat strategis untuk pemerintahan desa yang efektif. Lembaga desa, baik formal seperti BPD, LPM, dan Karang Taruna, maupun nonformal seperti kelompok tani dan PKK, berfungsi sebagai penggerak utama perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program desa. Lembaga-lembaga tersebut mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui forum Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa dengan partisipasi cukup tinggi. Penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Cikeruh berjalan melalui tiga pilar utama: pelayanan pemerintahan, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelayanan publik, administrasi umum, kependudukan, dan pembangunan dilaksanakan dengan baik, meskipun didominasi sistem manual dan kurang dukungan teknologi informasi. Ini menunjukkan upaya transparansi dan akuntabilitas, tetapi efektivitas pelayanan terbatas oleh rendahnya kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi. Dalam pembangunan desa, Dana Desa mendorong pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan, melibatkan masyarakat aktif. Namun, keterbatasan kompetensi aparatur dan lemahnya koordinasi antar lembaga desa menghambat optimalisasi pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, partisipasi warga dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan solidaritas sosial, meskipun ada kendala kapasitas dan pendanaan.

Penelitian ini menemukan bahwa pengembangan fungsi kelembagaan desa di Desa Cikeruh menghadapi kendala, terutama keterbatasan SDM, rendahnya pelatihan aparatur desa, keterbatasan anggaran, lemahnya sarana prasarana, dan koordinasi antar lembaga desa yang belum optimal. Rendahnya Indeks Kapasitas Desa (IKD) mencerminkan perlunya penguatan kelembagaan secara sistematis dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat, meskipun baik, belum merata karena kurangnya informasi, kesadaran, dan motivasi sebagian warga.

Konsep pengembangan fungsi kelembagaan desa yang relevan bagi Desa Cikeruh diarahkan pada penguatan kapasitas institusi desa melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, perbaikan sistem administrasi

desa, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan jaringan kerja sama eksternal. Pengembangan kelembagaan perlu disertai peningkatan partisipasi masyarakat inklusif melalui penguatan forum musyawarah desa dan transparansi perencanaan serta penganggaran. Dengan kelembagaan kuat, tata kelola pemerintahan desa akan lebih profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelia, Nina; Batubara, Beby Masitho; Zulyadi, Rizkan; Hidayat, Taufik Wal; Hariani, Riri Rezeki, 2020, Analysis of Community Institution Empowerment as a Village Government Partner in the Participative Development Process, Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), Vol 3, No 2, <https://biru-journal.com/index.php/birci/article/view/991>
- Apriyani, Lilin; Arif, Dikdik Baehaqi, (2019), Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa Toyareka Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 2, No 2, <http://dx.doi.org/10.12928/citizenship.v2i2.17991>
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka.
- Asnuddin, A. (2012). Pendekatan Partisipatif Dalam Pembangunan Proyek Infrastruktur Perdesaan Di Indonesia., SMARTek, Vol 8, No 3, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/SMARTEK/article/view/638>
- Beale, C.L. (1970). Population And Environment. Increasing Understanding of Public Problems and Policies, <https://www.semanticscholar.org/paper/POPULATION-AND-ENVIRONMENT-Beale/1732723524b2dd714814a556be15b26eddf31ce5>
- Bembridge, T. J. (1988). A proposed institutional framework for successful rural development in less developed areas of Southern Africa, *Development Southern Africa*, 5(1), 23–39. <https://doi.org/10.1080/03768358808439372>
- Buchari, Ahmad; Meilanny Budiarti Santoso, Nina Marlina, Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Garut (Studi Kasus Di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler), *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Volume 3 Number 1, Juni, diakses dari <https://doi.org/10.31947/jakpp.v3i1.4729>
- Creswell, Jhon. W. 2014. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Darwis, Rudi Saprudin; Zulfan, Ipit, 2018, Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat Dalam Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, DHARMAKARYA: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, Vol 7, No 4 <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v7i4.14465>
- Duvel, G.H., 1999, Institutional Structures For Participation, Empowerment And Ownership In Agricultural And Rural Development, *South African Journal of Agricultural Extension*, Vol 28, <https://www.ajol.info/index.php/sajae/article/view/3633/11580>
- Harfis; Sopyan; Afrizal, Dedy, 2019, FAKTOR Penghambat partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, *Jurnal Administrasi Publik & Bisnis*, Vol. 1, No. 2, September 2019, pp. 75-80, <https://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis/article/view/11/10>
- Isa, M., & Aflit Nuryulia Praswati. (2023). Penguatan Kelembagaan Desa Wisata Kreatif untuk Pengembangan UKM yang Berkelanjutan. *Abdi Psikonomi*, 4(1), 9–13. <https://doi.org/10.23917/psikonomi.vi.1398>
- jabarekspres.com, 2021, *Terkait Tumpukan Sampah di Bantaran Sungai Desa Cikeruh, Pihak Desa Berikan Klarifikasi*, Berita, Senin, 22 Februari, diakses dari <https://jabarekspres.com/berita/2021/02/22/terkait-tumpukan-sampah-di-bantaran-sungai-desa-cikeruh-pihak-desa-berikan-klarifikasi/>

- Kamuli, S., Mozin, N., & Dotutinggi, S. J. (2021). Pemberdayaan Perangkat Desa dalam Penguatan Kelembagaan Desa Talaki. *Jurnal Abdidas*, 2(2), 416 - 419. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i2.270>
- Mahmud, R., Yunus, R., & Sardi, N. I. (2021). Penguatan Kelembagaan Desa Bongkudai Barat Kecamatan Modayag Barat. *Jurnal Abdidas*, 2(2), 398 - 401. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i2.261>
- Nurasa, Heru, (2016), Analisis Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa: Suatu Studi Pada Program Pengembangan Masyarakat Miskin di Perdesaan, *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 2, No 1. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11849>
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Desa*. Jakarta: PT Gramedia.
- Nurcholis, Hanif, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Parjaman, Tatang; Soedarmo, Ung Runalan; Enas, Enas, 2019, Penguatan Kapasitas Aparatur Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah Di Era Global, *Journal of Management Review*, (Special Issue - Ekonomi Kebijakan 1), 29-42, <https://jurnal.unigal.ac.id/managementreview/article/download/2869/2518>
- Re, Benedick, (1988). *Population-Environment Linkages And Sustainable Development*, <https://www.semanticscholar.org/paper/Population-environment-linkages-and-sustainable-Re/b546826d4ac08c6df0f7e0c9c4e41bf2853ef5d1>
- Rossmann, G. B., & Rallis, S. F., 1998, *Learning In The Field: An Introduction to. Qualitative Studies*. *Journal of Qualitative Studies*, 2 (31-60).
- Sepyah Sepyah, Hardiyatullah Hardiyatullah, Hamroni Hamroni, Nur Jayadi, (2022), Pengaruh Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembuatan Kebijakan Publik Terhadap Penguatan Demokrasi Desa, *Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 2 No. 2, <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/juridar/article/view/108>
- Setiawan, Edi, dkk 2015, Aplikasi Kebijakan Untuk Mengatasi Permasalahan Tata Ruang Di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13542>
- Simangunsong, F., 2017, *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, S. (2021). Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Implementasi Undang-Undang Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 9(1), 31–42. <https://doi.org/10.31629/juan.v9i1.3223>
- Sutrisno, Budi, 2017, Identifikasi Potensi Dan Masalah Wilayah Rw06, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 1, No 2, <http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/16460>
- Tinov, M., & Handoko, T. (2017). Penguatan Kelembagaan Desa dalam Mewujudkan Otonomi di Desa-desa Pesisir: Studi di Desa Sokop Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(26), 98–111. <https://doi.org/10.35967/jipn.v15i26.3849>
- tribunnews.com, 2021, Banjir Luapan Sungai Cikeruh Jatinangor, Warga Tuding Imbas Proyek Tol Cisumdawu, berita 28 November, diakses dari <https://jabar.tribunnews.com/2021/11/28/banjir-luapan-sungai-cikeruh-jatinangor-warga-tuding-imbis-proyek-tol-cisumdawu>
- Uway, Valery Imanuel, (2024), Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *Lex Administratum*, Vol. 12 No. 4
- Winarni, E. D. (2020). Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Desa: Studi Kasus Di Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos)*, 2(1). <https://doi.org/10.31595/lindayasos.v2i1.247>
- Winarwan, Deddy, 2021, *Organizing the Future of Villages: Strengthening the Rural Economic Institutional*, ICLSSEE, EAI, DOI: 10.4108/eai.6-3-2021.2306188

- Yuningsih, Henny, et al, 2022, Studi Kasus Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Desa-Birokrasi dengan Desa-Adat di Wilayah Provinsi Bali. *Jurnal Supremasi*, 12(1), 25-43. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1825>
- Yustika Ahmad Erani. 2012. *Ekonomi Kelembagaan*. Jakarta: Erlangga.